

# Partisipasi Politik Pemilih Pemula Etnis Minoritas Pasca Reformasi

Agus Machfud Fauzi<sup>1\*</sup>, Martinus Legowo<sup>1</sup>, Novi Fitia Maliha<sup>2</sup>, Moh Mudzakkir<sup>1</sup>, Sugeng Harianto<sup>1</sup>, Ardhie Raditya<sup>1</sup>, Arif Sudrajat<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Negeri Surabaya

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

\*e-mail: [agusmfauzi@unesa.ac.id](mailto:agusmfauzi@unesa.ac.id)

## Abstrak

Muda-Mudi Budhayana Surabaya merupakan pemilih pemula yang mempunyai perhatian dan berpartisipasi terhadap Pemilu, biasanya kelompok minoritas tidak mempunyai kepedulian terhadap agenda politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap partisipasi kelompok minoritas dalam agenda pemilu paska era reformasi, ini juga untuk membuktikan bahwa mereka tidak hanya peduli terhadap dunia bisnis dan ekonomi, namun juga mempunyai perhatian dan berpartisipasi terhadap pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode campuran antara kuantitatif dan kualitatif, supaya lebih menghasilkan penelitian yang mendalam. Peneliti menggunakan teori *voting behavior* untuk menganalisis perilaku pemilih Muda-Mudi Budhayana, yaitu seperti apa saja perilaku mereka dalam dunia politik. Hasil penelitian menggambarkan bahwa perilaku politik mereka berpartisipasi aktif dalam pemilu dengan wawasan politik terbuka setelah dicabutnya Instruksi Presiden No. 14 tahun 1967. Implikasi penelitian ini dalam dunia bisnis maka berpengaruh lebih bagus dalam menjalankan roda bisnis sebab ada kebebasan dalam menjalankan.

**Kata kunci:** Muda-Mudi; Minoritas; Perilaku Pemilih; Wawasan Pemilu

## Abstract

The young Buddhists of Surabaya are novice voters who have concern and participate in the general election, usually minority groups do not have any concern for the political agenda. This study aims to reveal the participation of minority groups in the election agenda after reformation era, this is also to prove that they do not only care about the business world and the economy, but also have attention and participate in elections. The research method used is a mixture of quantitative and qualitative methods, in order to produce more in-depth research. Researchers use voting behavior theory to analyze the behavior of young Buddhists, namely what their behavior is in the political world. The results of the study illustrate that their political behavior actively participates in elections with open political insight after the revocation of Presidential Instruction No. 14 1967.

**Keywords:** Young People; Minority; Voter Behavior; Election Insight

---

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.



## PENDAHULUAN

Perilaku pemilih dalam pesta demokrasi (baik pemilu legislatif, pemilu presiden dan pilkada) biasanya pemilih berpartisipasi tergantung pada keberadaan dan posisi mereka dalam dunia politik. (Yustiningrum & Ichwanuddin, 2015) Jika mereka merupakan kelompok yang diuntungkan, maka berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan agenda politik yang berupa tahapan pemilu. Sebaliknya, jika tidak diuntungkan maka mereka tidak tertarik berpartisipasi dalam pemilu dan politik, mereka biasanya tidak mempedulikan proses hadirnya pemimpin baru. (Fauzi, 2019).

Fenomena Perilaku pemilih etnis minoritas Tionghoa yang tergabung dalam Muda Mudi Budhayana Surabaya berbeda dengan yang menjadi pemahaman pada umumnya. Mereka merupakan etnis minoritas tetapi mempunyai sikap yang berbeda, yaitu tetap berpartisipasi dalam pemilu. Berbeda dengan pemilih lainnya yang sangat tergantung kepada apa yang mereka dapatkan secara kalkulasi rasional (Mawlana & Fauzi, 2021). Fenomena ini menarik diteliti untuk mengungkap apa saja yang menjadi penjelasan dari perilaku pemilih etnis minoritas ini.

Pada penelitian terdahulu dijelaskan keberadaan partisipasi pemilih karena ada alasan yang heterogin. Terdapat perilaku pemilih yang beragam dan dinamis dalam menghadapi pemilu, sehingga ada beberapa model pemilih dan pilihannya tergantung pada dimana mereka berada dan keberadaan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. (Fahmi & Fauzi, n.d.) Contoh perbedaan pilihan dalam penelitian Fahmi ini terjadi pada saat Pemilu Presiden 2019, namun bisa juga terjadi pada suasana pada pelaksanaan pemilu lainnya. Hasil pada penelitian lain terkait partisipasi pemilih sampai terbedakan yang menjadi perilaku pemilih tren di 2014 selanjutnya berubah dibandingkan dengan perilaku pemilih tren 2019, meski di tempat lain tidak

ada dinamika. Misalkan perbedaan pada perilaku pemilih memilih calon yang berbeda meski peserta pemilunya hampir sama (Salabi, 2021)

Keberadaan Partisipasi pemilih dalam politik menjadi standar pelaksanaan kehidupan berdemokrasi. Hal ini dihubungkan partisipasi secara kuantitatif pemilih hadir di TPS, yang seharusnya secara kualitatif mendapat perhatian sehingga partisipasi pemilih tidak sebatas jumlah dan angka pada pelaksanaan pemilu yang mengedepankan kuantitas (Yustiningrum & Ichwanuddin, 2015). Pada hasil penelitian lainnya menggambarkan pada efek negatif. Hal ini karena pelaksanaan demokrasi formal terintervensi dengan perilaku pemilih negatif yaitu terjadi politik uang. Mereka menerima politik uang sebagai alasan untuk berpartisipasi dalam penggunaan hak pilihnya (Zain & Fauzi, 2021), Perilaku pemilih ini dipengaruhi oleh yang dipilih atau calon (Calon legislatif, calon kepala daerah, calo kepala desa, dll). (Fauzi & Fauzi, 2021).

Perilaku pemilih menjadi berbeda jika terjadi dalam suasana pemilu dan politik rasial, yaitu ia mengurangi kesetaraan (Banks et al., 2019). Peran calon dan pemilih dibatasi oleh aturan yang seharusnya tidak terjadi. Apalagi dalam pelaksanaan demokrasi keberadaan pemilih ditarget dalam penggunaan hak pilihnya. (Fauzi et al., 2018). Memilih itu hak dari pemilih, namun jika mereka ditarget terkait partisipasinya maka ada penilaian yang tidak seimbang antara pelaksanaan pemilu dengan angka partisipasi pemilih. Hal ini membuat perilaku pemilih terintervensi dengan kebijakan angka partisipasi. Bahkan kalau menjadi alat untuk perbandingan apakah yang lebih banyak partisipasinya lebih demokratis, hal ini mengganggu substansi demokrasi. Ia bisa membuat label hitamnya demokrasi karena partisipasi pemilih kurang secara kuantitas (Banks et al., 2019).

Politik kekerasan jika terjadi pada tahapan pemilu, ia berpengaruh negatif terhadap keberlangsungan tahapan pemilu. (Milliff, n.d.) Begitu juga faktor psikologis pemilih menjadikan mereka tidak peduli terhadap pemilu. Instruksi Presiden Nomer 14 tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Etnis Tionghoa menjadi salah satu kendala dalam kehidupan berdemokrasi.

Kapasitas dan kemampuan calon berpengaruh terhadap partisipasi pemilih. (Sobari, n.d.). Hal ini mempengaruhi dinamika perilaku pemilih untuk memberikan hak pilihnya. Keberadaan calon yang berhubungan dengan lembaga yang berpengaruh, misalkan pesantren atau organisasi keagamaan juga bisa berpengaruh terhadap perilaku pemilih. (Amelia et al., 2020). Apakah hal ini juga menjadi bagian dari perilaku pemilih Etnis Tionghoa, maka menjadi hal yang menarik untuk diungkap.

Perilaku peserta pemilu berpengaruh terhadap pilihannya Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu sebagaimana harapan rakyat pada umumnya, Hal ini juga berpengaruh terhadap perilaku pemilih. (Bariguna et al., 2021). Keberadaan media memberikan informasi performa calon, ia memberikan informasi, terkadang mempengaruhi terhadap perilaku dan dinamika pemilih dalam menentukan pilihannya (Shoa & Gizaw, 2021).

Politik uang terkadang berpengaruh pada keberadaan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilih yaitu bagu masyarakat yang belum sejahtera (Rozy et al., 2020). Ia menjadi fenomena perilaku pemilih yang pragmatik (S. A. Fauzi & Fauzi, 2021). Bahkan ia bisa menggemoni para pemilih membentuk perilaku pemilih yang tidak melihat substansi pemilu namun sebatas prosedural pemilu. (A. M. Fauzi, 2017). Ada beberapa daerah di Indonesia, bahwa perilaku pemilih terkadang dipengaruhi oleh tradisi nenek moyang, misalkan dengan kirim "sesajen" menjelang

pemilihan. (Karerina et al., 2021) Hal ini bukan dikategorikan yang tidak bermoral, namun lebih pada menjalankan tradisi (Walter & Redlawsk, 2021)

Perilaku pemilih yang tidak menghadirkan proses demokrasi baik, maka akan ditinggalkan oleh para pelaku demokrasi, (van Elsas et al., 2016) meski terkadang masih dikembangkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab terhadap pengembangan demokrasi, misalkan seperti keberadaan politik uang, secara teoritis seharusnya dititnggalkan, namun pada prakteknya masih berjalan. (Rozy et al., 2020); (S. A. Fauzi & Fauzi, 2021). Branding politik seseorang calon berpengaruh terhadap perilaku pemilih, sebab ia mejadi daya tarik untuk dipilih. (A. M. Fauzi, 2020) ia berpotensi menghadirkan efek positif terhadap pilihan pemilih. (Walter & Redlawsk, 2021; Asano et al., 2021).

Kebaharuan dari penelitian ini yaitu belum ada yang meneliti tentang perilaku pemilih etnis minoritas dalam pelaksanaan pemilu paska reformasi. Seharusnya mereka tidak berpartisipasi pemilu dan tidak peduli poliik, namun yang terjadi mereka mempunyai kepedulian terhadapnya. Hal ini yang peneliti ungkap sehingga menjadikan hal baru dalam perilaku pemilih.

## **METODE**

Peneliti mengumpulkan data dengan pendekatan metode campuran antara kuantitatif dan kualitatif. (Vebrianto et al., 2020). Metode ini menggunakan kualitatif dan kuantitatif dalam rangka mempermudah pelaksanaan penelitian, karena secara kuantitatif jumlah responen tidak banyak. Secara Kuantitatif menolong penlitu untuk memperdalam informasi yang dihadirkan para informan. Hal ini memudahkan etnis Tionghoa memberikan jawaban terhadap berbagai pertanyaan dari peneliti. Subyek penelitian bukan menjadi kelompok

mayoritas dalam pelaksanaan pemilu, namun partisipasinya mempunyai arti besar atas pelaksanaan pesta demokrasi.

Ada 11 orang etnis Tionghoa yang bersedia untuk memberikan informasi tentang perilaku pemilih dalam proses politik dan pemilu. Responden memberikan data tentang partisipasi mereka dalam pemilu setelah mereka mendapatkan *google form* sebagai instrumen untuk pendekatan metode kuantitatif. Untuk memperdalam maka dilakukan wawancara mendalam dengan cara pemberian pertanyaan *google form* dengan pola uraian, selain pertanyaan *multiple choice*. Setelah itu dilaksanakan dialog dengan pemberian materi pendidikan politik bagi generasi muda, ini sebagai cara untuk penelitian secara kualitatif. (Tungka, 2016). Langkah ini dilakukan untuk memudahkan peneliti mendapatkan informasi secara mendalam, sambil peneliti melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Metode campuran tersebut menghasilkan jawaban yang menjadi kebutuhan peneliti untuk mengungkap partisipasi pemilih etnis minoritas dalam pelaksanaan pemilu. Yang sementara ini publik belum tahu bagaimana penegetahuan mereka tentang politik dan demokrasi, begitu juga bagaimana partisipasi mereka dalam pelaksanaan proses mencari pemimpin negara. Teori perilaku pemilih politik digunakan untuk menganalisisnya dengan mendasarkan pada realitas etnis Tionghoa di Surabaya. (Guo, 2020; Sobari, n.d.)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika etnis minoritas Tionghoa dalam perpolitikan nasional terjadi di Indonesia. Jatuh Bangun dalam berpolitik sempat mereka alami. Semenjak hadirnya Kepres No 6 Tahun 2020, Etnis Tionghoa berani menampilkan kembali identitas dan aktif dalam perolitikan negeri. (Pris, 2019)

Etnis Tionghoa berpartisipasi aktif dalam pemilu di medan. (Suharyanto,

2014). dan di tempat lainnya paska mereka diberi kesempatan, sebab sebelumnya ada isu tidak sedap hubungannya dengan G 30 S PKI. (Pratama, n.d.). setelah Reformasi mendapat kesempatan ini (Juliastutik, 2010)

Para anggota legislatif mempunyai kepedulian terhadap etnis minoritas dalam berpartisipasi pemilu. (Dinesen et al., 2021). Selain peran aktif mereka sebagai representasi dalam pencalonan pemilu. (Imawan & Haryanto, 2019). Ia sebagai kebutuhan pemilu yang menampilkan pluralitas dalam pemilu. (Damanik, 2019)

Penelitian ini menghasilkan data yang menarik tentang perilaku pemilih etnis minoritas Tionghoa yang berperan aktif dalam politik dan pemilu. Muda-mudai Budhayana yang memberikan respon dan informasi ada 11 orang, mereka berumur dari 18 tahun sampai 29 Tahun. Artinya mereka semua sudah mempunyai hak pilih, atau dalam bahasa lain, mereka mempunyai kewenangan untuk menjawab questioner dan wawancara mendalam penelitian.

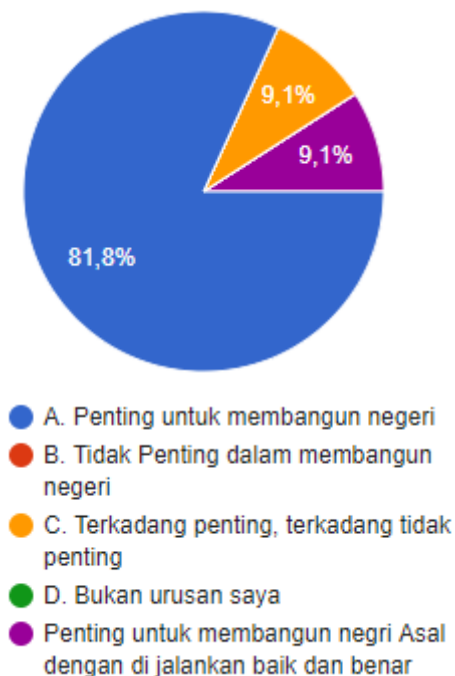
Pertanyaan pertama untuk mengetahui, yaitu apakah mereka berpartisipasi dalam pemilu, sebagai berikut:



Gambar 1: 100% Pemilih Etnis Tionghoa Berpartisipasi sebagai pemilih

Yang menjadi alasan partisipasi pemilih ini karena mengikuti kegiatan keluarga dalam menyampaikan aspirasinya. Sebagian menjawab mengikuti warga sekitar, supaya tidak ditinggalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagian menjawab bahwa tuntutan sebagai warga negara Indonesia, merupakan kebutuhan untuk mengaktualisasikan terhadap kepemilikan hak warga negara untuk boleh memiliki menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya. Kata mereka suara itu penting, satu suara pun berpengaruh terhadap masa depan negara. Dan ini merupakan tugas yang mulia untuk memilih pemimpin. Tersebut merupakan jawaban digunakan untuk memperdalam respon Muda-Mudi Budhayana terhadap alasan mereka memilih pada pemilu.

Pertanyaan tentang pemahaman partai politik oleh etnis Tionghoa. Mereka menjawab yang beragam, yaitu sebagai berikut:



Gambar 2. Pengertian Partai Politik

Muda-Mudi Budhayana memberikan jawaban yang beragam terkait pemahaman mereka tentang partai politik. Jawaban paling banyak adalah "Partai politik merupakan instrumen untuk membangun negeri". Berbeda dengan fenomena partai politik yang sering konflik dan saling menjatuhkan dalam kepemimpinan negara. Ini menunjukkan mayoritas mereka melihat positif terhadap perjalanan partai politik di Indonesia. Pertanyaan ini bukan diberikan setelah dijelaskan, namun disampaikan sebelum materi pendidikan politik disampaikan. Menandakan pengetahuan dan pemahaman mereka berdasarkan perjalanan partai politik kekinian/

Ada yang menjawab "Terkadang penting, terkadang tidak penting". Ini sebagai perspektif bahwa keberadaan partai politik bukan hal yang selalu penting. Menjadi tampan terhadap para aktifis partai politik untuk bekerja sesuai dengan apa maksud partai politik hadir dalam negara demokrasi.

Yang menjawab "Bukan urusan saya", menandakan yang bersangkutan tidak peduli atau cuek terhadap partai politik. Jawaban ini tidak bisa disalahkan sebab mendasarkan pengetahuan dan pemahaman mereka. Perlu ada perbaikan kehidupan berpartai politik sehingga tidak ada pemahaman yang salah antara substansi partai politik dan praktek kehidupannya. Ia terjadi untuk semua tahapan Pemilu.

Etnis Tionghoa memberikan penjelasan penguat bahwa mereka mempercayakan sistem pemerintah dan kewarganegaraan sesuai dengan pilihan dan harapannya. Bukan terhadap seseorang yang ingin menghadirkan sesuai dengan keinginannya.

Berpartisipasi dalam membangun negeri merupakan idealisme mereka yang harus dihadirkan. Berbeda dengan pemahaman bahwa etnis Tionghoa hanya

mempunyai kepedulian untuk membangun usaha dan bisnisnya. Ketika diajukan pertanyaan "Apakah generasi muda, seperti Muda-Mudi Budhayana perlu atau tidak berpartisipasi membangun negeri?" berikut jawabannya:



Gambar 3. Partisipasi dlm Politik

Mayoritas Etnis Tionghoa menyatakan penting untuk berpartisipasi dalam berpolitik sebab ia menjadi bagian untuk membangun negeri. Sebagian kecil menjawab tidak penting sebab sudah ditangani generasi tua. Dua jawaban tersebut menggambarkan bahwa mereka ada kebebasan dalam menentukan pilihan berhubungan dengan berpartisipasi dalam politik. Ini menjadi bagian dari perilaku pemilih etnis Tionghoa.

Mereka tidak terkooptasi dengan pimpinan organisasi yang diikuti, sebab ada alternatif pilihan yang bisa dipilih yaitu "Tergantung keputusan pimpinan organisasi". Namun alternatif tersebut tidak

satupun mengambilnya. Hal ini menggambarkan independensi mereka muncul dalam kehidupan berpolitik.

Egoisme ditingalkan meski ada alternatif pilihan "Bukan urusan saya". Mereka tidak memilih alternatif ini, satupun mengabaikan jawaban tersebut. Hal menggambarkan bahwa mereka berpartisipasi menjadi bagian dari kehidupan membangun negeri.

Jawaban secara kuantitatif tersebut diperdalam dengan pendekatan kualitatif, yaitu pertama pada google form diberi pertanyaan yang membutuhkan jawaban uraian, bukan *multiple choice*. Sesudah itu ada pendalaman dengan dialogis.

Perlu berpartisipasi membangun ini karena untuk menyiapkan generasi selanjutnya sebagai kepemimpinan mendatang. Hal ini menjadi perhatian, supaya tidak terputus dalam regenerasi kepemimpinan negeri. Perlu ada generasi yang disiapkan untuk melanjutkan kepemimpinan negeri.

Etnis Tionghoa merasa sebagai bagian dari negara Indonesia, maka menurut mereka perlu terlibat dalam pembangunan negara. Pembangunan ini tidak hanya pada dunia usaha dan bisnis, termasuk dalam pembangunan dalam dunia politik dan kepemimpinan. Jawaban ini belum diterima sepenuhnya oleh masyarakat secara umum. Hal ini didukung bahwa mereka mempunyai hak dan kewajiban untuk berkontribusi membangun negeri, yaitu diwujudkan dalam partisipasi politik dan pemilu.

Hak dan kewajiban tersebut untuk bersuara yang sama terhadap kegiatan atau program yang menguntungkan atau merugikan umat atau masyarakat, baik yang mayoritas atau minoritas. Penjelasan informan ini, seperti mengkritik terhadap posisi mereka sebagai minoritas terhadap kelompok mayoritas dan sebaliknya.

Ada yang menjawab bahwa Muda-Mudi Budhayana menjadi bagian dari generasi muda yang menjadi calon

pengganti pemimpin bangsa. Hal ini membuat keterbukaan, bahwa mereka tidak lari dari dunia politik dan pemilu, yang selama ini mereka tidak terlalu peduli. Kesadaran ini perlu ada respon positif dari pihak lainnya, supaya tidak terpotong di tengah jalan oleh kelompok yang tidak suka terhadap eksistensinya.

Keberadaan mereka yang merupakan kelompok minoritas, pada awalnya tidak mempunyai pengaruh dalam pembangunan negara. Pernyataan ini sebagai kesadaran posisinya yang minoritas, bisa berubah menjadi berpengaruh jika mampu masuk ke dunia politik dan pembangunan negara.

Kesadaran mereka ada yang menjadikan penjelasan berangkat dari keberadaan Pancasila sebagai dasar negara. Berpartisipasi pada politik dan Pemilu berdasarkan pada Pancasila sebagai dasar bernegara.

Ada jawaban yang berbeda dengan pemahaman secara umum, yaitu Etnis Tionghoa berpartisipasi dalam membangun sebab mereka adalah anak negeri. Keberadaan mereka terkadang masih dipertanyakan meski sudah hidup di negara Indonesia sudah sekian lama, bahkan semenjak lahir sudah di Indonesia. Perlu dibedakan para etnis Tionghoa yang baru datang di Indonesia untuk mengisi dunia tenaga kerja sebagaimana berbagai pemberitaan di media sosial.

Partisipasi bernegara digunakan sebagai arah pembangunan negara menjadi salah satu informasi mendalam dari informan. Ia membutuhkan semua komitmen dari semua suku bangsa dan etnis yang ada di Indonesia.

Informan terakhir memberikan informasi bahwa semakin banyak yang berbuat untuk memberikan atau berpartisipasi pembangunan negara, maka semakin banyak ide dan gagasan untuk memperbaiki negeri, maka semakin banyak yang didapatkan dari hal positif untuk pembangunan dan kemajuan negara.

Uang bukan menjadi bahan diskursus dalam proses penelitian kepada etnis Tionghoa, namun jika mereka menampilkan perilaku pemilihnya berdasarkan pada materialistis maka akan muncul dalam berbagai jawaban saat pengisian survei berdasarkan pada google form, atau ketika wawancara mendalam.

Kesetaraan dalam perilaku pemilih etnis Tionghoa tampak pada kesempatan mereka menyampaikan pendapatnya. Mereka menginginkan tidak ada perbedaan dalam pemberian fasilitas hak politik dalam pemilu, baik bagi kelompok minoritas atau kelompok mayoritas. Hal ini menghadirkan semangat untuk aktif dalam politik dan demokrasi untuk membangun negeri. Semangat reformasi yang memberikan kesempatan untuk berperan aktif, setelah ada pengekangan pada waktu pemerintahan Orde Baru, menjadikan spirit untuk membangun negeri. Hal ini tergambarkan pada perilaku pemilih dalam proses pemilu, yaitu berperan aktif meski belum semua informan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019 karena terkendala umur.

Tidak ada catatan negatif terkait politik kekerasan sebagai perilaku pemilih dalam keikutsertaan Etnis Tionghoa pasca dibukanya kesempatan yang sama pasca era reformasi. Dahulu Instruksi Presiden Nomer 14 tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Etnis Tionghoa, ia membelenggu berbagai kegiatan sebab pelaksanaan kegiatan tidak boleh mencolok, cukup internal. Mereka menjadi bebas untuk mengekspresikan kehidupan kebangsaannya, sehingga mereka mendapatkan ruang kebebasan dalam menyampaikan hak politiknya sebagai perilaku pemilih.

Kapasitas dan kemampuan calon menjadi bagian yang diperbincangkan sebab standar normal kelompok masyarakat menginginkan kesejahteraan dan kemakmuran tercapai dengan kepemimpinan yang mampu menghadirkan

kebaikan tersebut. Etnis Tionghoa mempunyai semangat membangun negeri, salah satunya untuk menghadirkan calon pemimpin yang berkapasitas dengan bantuan mereka untuk memberikan masukan terhadap arah pembangunan negara. Semakin banyak yang memberikan masukan, maka berdampak positif terhadap hasilnya.

Perilaku pemilih etnis Tionghoa mempunyai harapan baru pasca reformasi. Perilaku mereka sebagai pemilih berubah menjadi aktif untuk berpartisipasi sebagai pemilih, baik dalam kegiatan tahapan pemilu, atau kegiatan pembangunan negeri lainnya.

#### **SIMPULAN DAN SARAN**

Perilaku pemilih etnis Tionghoa dalam Muda-Mudi Budhayana menjadi jawaban terhadap kecurigaan mereka tidak mau berpartisipasi dalam berpolitik atau membangun negeri. Ia sebagai pembuka pembangunan negeri pasca dibukanya saluran demokrasi semenjak pemberlakuan Kepres No 6 Tahun 2000. Semangat mereka perlu mendapat perhatian dan diberi ruang untuk mengekspresikan dalam kehidupan demokrasi, politik dan kebangsaan.

#### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih ditujukan kepada LPPM Universitas Negeri Surabaya, melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya yang telah membiayai penelitian ini sampai bisa dipublikasikan di journal. Semoga menjadi bacaan yang menarik untuk mengembangkan keilmuan dan pengetahuan ilmu-ilmu sosial.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Amelia, A., Krismawati, D., Setiawan, M. A., Cahyani, R. A., Suhada, H., & Fauzi, A. M. (2020). Perubahan Pilihan Santri Gresik Pada Pilpres 2019. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial*

*dan Politik*, 2(2), 146. <https://doi.org/10.33474/jisop.v2i2.6692>

Asano, T., Tago, A., & Tanaka, S. (2021). The Role of Public Broadcasting in Media Bias: Do People React Differently to Pro-government Bias in Public and Private Media? *Political Behavior*. <https://doi.org/10.1007/s11109-021-09756-0>

Banks, A. J., White, I. K., & McKenzie, B. D. (2019). Black Politics: How Anger Influences the Political Actions Blacks Pursue to Reduce Racial Inequality. *Political Behavior*, 41(4), 917–943. <https://doi.org/10.1007/s11109-018-9477-1>

Bariguna, F. P., Sulaeman, A., & Budi Darmawan, W. (2021). Electoral Behavior in The Electability of Presidential and Vice Presidential Candidates in The 2019 Elections. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 6(1), 13–22. <https://doi.org/10.24905/jip.6.1.2021.13-22>

Damanik, E. L. (2019). Ethnic Cleavages: The Descendant and Clan Sentiment on Local Executive Election in North Tapanuli, North Sumatera Province. *Komunitas: International Journal Of Indonesian Society And Culture*, 11(1), 47–62. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v11i1.17410>

Dinesen, P. T., Dahl, M., & Schjøler, M. (2021). When Are Legislators Responsive to Ethnic Minorities? Testing the Role of Electoral Incentives and Candidate Selection for Mitigating Ethnocentric Responsiveness. *American Political Science Review*, 115(2), 450–466. <https://doi.org/10.1017/S0003055420001070>



- Fahmi, M. H., & Fauzi, A. M. (n.d.). *Perilaku Pemilih Masyarakat Kabupaten Lamongan Pada Pilpres 2019*. 19.
- Fauzi, A. M. (2017). *Hegemoni Pejudi Dalam Pilkada Di Indonesia*. 10(2), 8.
- Fauzi, A. M. (2019). *Perilaku Pemilih Menjelang Pemilu 2019*. 9.
- Fauzi, A. M. (2020). Maintaining Positive Branding of Regional Heads Amid the Covid-19 Pandemic: *Proceedings of the International Joint Conference on Arts and Humanities (IJCAH 2020)*. International Joint Conference on Arts and Humanities (IJCAH 2020), Surabaya, East Java, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201201.178>
- Fauzi, A. M., Affandi, A., & Jatningsih, O. (2018). Voters Participation Target Vs Democracy Election organizer program on the use of voting rights in East Java 2018. *Proceedings of the 1st International Conference on Social Sciences (ICSS 2018)*. Proceedings of the 1st International Conference on Social Sciences (ICSS 2018), Bali, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/icss-18.2018.63>
- Fauzi, S. A., & Fauzi, A. M. (2021). *Fenomena Money Politik pada Pemilihan Kepala Desa Petiken Tahun 2018*. 23, 9.
- Guo, Q. (2020). The Relationship between Voting Behavior and Election Commitment: A Literature Review. *Open Journal of Social Sciences*, 08(02), 201–210. <https://doi.org/10.4236/jss.2020.82016>
- Imawan, A. P., & Haryanto, H. (2019). Models of Political Representation: A Study of Village Chief Elections and Candidacies. *PCD Journal*, 7(2), 147. <https://doi.org/10.22146/pcd.51450>
- Juliastutik, J. (2010). Perilaku Elit Politik Etnis Tionghoa Pasca Reformasi. *HUMANITY*, 6(1), 45–58.
- Karerina, N., Ifadah, A., Arisholina, S. A., Wulaningsih, A., Ricard, L., & Fauzi, A. M. (2021). Konstruksi Masyarakat pada Tradisi Nyajen Sebagai Usaha Keberhasilan Cakades Jelang Pilkadaes. *Jurnal Penelitian Agama*, 22(1), 103–114. <https://doi.org/10.24090/jpa.v22i1.2021.pp103-114>
- Mawlana, A., & Fauzi, A. M. (2021). *Rasionalitas Masyarakat Desa Lalangon Memilih Kepala Desa Perempuan*. 05(1), 15.
- Milliff, A. (n.d.). Facts Shape Feelings: Information, Emotions, and the Political Consequences of Violence. *Political Behavior*, 22.
- Pratama, A. (n.d.). *Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Di Indonesia*. 16.
- Pris, P. (2019, February 5). Jatuh Bangun Etnis Tionghoa dalam Politik Indonesia. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190205120557-32-366561/jatuh-bangun-etnis-tionghoa-dalam-politik-indonesia>
- Rozy, F., Ramadhan, P. A., Febriansyah, R., Fahrurozi, F. A., Rizky, A. I., & Fauzi, A. M. (2020). Praktik Politik Uang dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Sumberingin Kidul Tahun 2019. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 7(1), 37. <https://doi.org/10.24036/scs.v7i1.171>
- Salabi, A. (2021, March 12). Rata-Rata Partisipasi Pemilih Disabilitas di Pilkada 2020 64,62 Persen. *Rumah Pemilu.Org*. <https://rumahpemilu.org/pemilih-disabilitas/>
- Shoa, D. D., & Gizaw, H. M. (2021). Political Dynamics the Rift of EPRDF Coalitions Since the

- Outbreak of Qerro's Protest to the Nomination of Dr. Abiy Ahmed in Ethiopia. *The Journal of Society and Media*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.26740/jsm.v5n1.p1-18>
- Sobari, W. (n.d.). *Capacity and Adequacy: Explicating Voting Behavior in A Multilevel and Concurrent Local Election*. 32.
- Suharyanto, A. (2014). *Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah*. 10.
- Tungka, N. F. (2016). *Combining Qualitative And Quantitative Methods In Data Analysis*. 2(1), 4.
- van Elsas, E. J., Miltenburg, E. M., & van der Meer, T. W. G. (2016). If I recall correctly. An event history analysis of forgetting and recollecting past voting behavior. *Journal of Elections, Public Opinion and Parties*, 26(3), 253–272. <https://doi.org/10.1080/17457289.2016.1150286>
- Vebrianto, R., Thahir, M., Putriani, Z., Mahartika, I., Ilhami, A., & Diniya, D. (2020). Mixed Methods Research: Trends and Issues in Research Methodology. *Journal of Education and Learning*, 1(2), 11.
- Walter, A. S., & Redlawsk, D. P. (2021). The Effects of Politician's Moral Violations on Voters' Moral Emotions. *Political Behavior*. <https://doi.org/10.1007/s11109-021-09749-z>
- Yustiningrum, R. E., & Ichwanuddin, W. (2015). Partisipasi Politik Dan Perilaku Memilih Pada Pemilu 2014. *Jurnal Penelitian Politik*, 12(1), 117–135.
- Zain, S. S., & Fauzi, A. M. (2021). *Rasionalitas Mahasiswa Berpartisipasi Dalam Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Kenep*. 7.